

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan perangkat yang berfungsi sebagai sarana penyajian kondisi finansial sekaligus landasan penilaian bagi berbagai pihak berkepentingan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang tepat. Peran yang diemban tidak sekadar terbatas pada penyampaian informasi, melainkan turut memfasilitasi proses pengambilan keputusan strategis yang rasional. Keberadaan laporan keuangan yang tersusun secara akurat, reliabel, serta memiliki tingkat kredibilitas tinggi menjadi ekspektasi kolektif, baik dari pihak internal organisasi maupun dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Namun, harapan besar dari pihak eksternal di satu sisi dapat menjadi tekanan bagi manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunannya. Pemenuhan harapan yang tinggi tidak jarang ditempuh melalui rasionalisasi berbagai tindakan yang menyimpang, hingga pada akhirnya praktik manipulatif terhadap laporan keuangan dianggap sebagai pilihan yang dapat diterima. Situasi ini mencerminkan adanya kecenderungan pembenaran atas perilaku disfungsional, di mana integritas pelaporan dikesampingkan demi menjaga citra kinerja yang diharapkan.

Suatu perbuatan yang mengakibatkan distorsi informasi finansial dan menghasilkan keuntungan sepihak dengan merugikan pihak lain diklasifikasikan sebagai *fraud*. Tindakan tersebut tidak memiliki justifikasi yang dapat diterima dalam

kondisi apa pun karena mengandung unsur kesengajaan serta pelanggaran integritas. Praktik yang dimaksud tercermin pada manipulasi laporan keuangan, yakni rekayasa penyajian informasi akuntansi yang menyimpang dari keadaan sebenarnya. Berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh ACFE, *fraud* dipahami sebagai aksi yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun entitas guna memperoleh manfaat pribadi melalui cara yang merugikan pihak lain. ACFE menjelaskan *fraud* tidak hanya soal korupsi tetapi juga kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang menjadi tiga pilar utama. Ketiga hal ini biasanya digambarkan dalam skema yang dikenal sebagai "pohon kecurangan" atau *fraud tree* (ACFE, 2024).

Ketiga kategori *fraud* tersebut memiliki perbandingan yang kontras baik dari segi intensitas dan dampak kerugian finansial yang dihasilkan. Dibandingkan dengan jenis kecurangan lainnya, kecurangan laporan keuangan seringkali menjadi sebab kerugian terbesar. Hal ini dikarenakan skala dan dampaknya yang dapat mempengaruhi investor, kreditur, serta stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Kerugian dengan nilai relatif kecil lebih sering ditimbulkan oleh praktik pengambilan atau pemanfaatan sumber daya organisasi secara tidak sah, yang dikenal sebagai penyalahgunaan aset. Frekuensi kejadiannya tinggi karena tindakan ini umumnya mencakup perolehan atau penggunaan aset perusahaan dalam skala terbatas, sehingga dampak finansialnya tidak sebesar bentuk kecurangan lainnya. Sementara itu, kasus korupsi berada di antara kedua kategori tersebut, dengan frekuensi kejadian yang cukup tinggi dan nilai kerugian yang juga signifikan. Agar gambaran perbandingan kerugian dari masing-

masing kategori *fraud* lebih jelas, berikut adalah data dari *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse* tahun 2024



Gambar 1.1. Grafik *Fraud* 2024

Sumber: AFCE, 2024

Dari ketiga skema tersebut menunjukkan kecurangan laporan keuangan kembali menyumbang kerugian finansial terbesar. Berdasarkan data tersebut, kerugian akibat kecurangan laporan keuangan mencapai median \$766,000. Sebagai perbandingan, kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan aset hanya mencapai \$120,000, meskipun jenis kecurangan ini memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi, yaitu 89%. Sementara itu, kerugian akibat korupsi mencapai \$200,000 dengan frekuensi hampir 50%, (ACFE, 2024).

Tabel 1.1 Lima Sektor dengan median kerugian *fraud* tertinggi secara global

No	Sektor Industri (Terjemahan)	Median Kerugian (USD)
1	Pertambangan (Mining)	550.000
2	Perdagangan Besar (Wholesale Trade)	361.000
3	Manufaktur (Manufacturing)	267.000
4	Konstruksi (Construction)	250.000
5	Real Estat, Pemerintahan & Administrasi Publik (Tie)	200.000

Sumber: AFCE, 2024

Selain ditinjau berdasarkan jenis kecurangannya, besaran kerugian *fraud* juga dapat dianalisis berdasarkan sektor industri tempat kecurangan tersebut terjadi. Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor pertambangan (mining) mencatat median kerugian sebesar USD 550.000 per kasus, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya dalam daftar lima besar. Sektor perdagangan besar (wholesale trade) berada pada posisi berikutnya dengan median kerugian USD 361.000, diikuti oleh manufaktur sebesar USD 267.000, konstruksi sebesar USD 250.000, serta real estat, pemerintahan, dan administrasi publik dengan median kerugian sebesar USD 200.000. Perbedaan nominal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki tingkat dampak finansial yang lebih besar ketika fraud terjadi.

Kecurangan laporan keuangan masih menjadi masalah krusial di negara manapun, termasuk di negara maju. Selain kasus Enron di Amerika Serikat, kasus besar juga terjadi di sektor energi, yaitu Petrobras di Brasil. Petrobras, perusahaan minyak

dan gas terbesar di Amerika Latin, terjatuh skandal korupsi dan manipulasi laporan keuangan yang dikenal dengan nama *Operation Car Wash (Lava Jato)*. Skandal ini mulai terungkap pada tahun 2014 ketika ditemukan adanya praktik penyuapan, penggelembungan kontrak, dan pencatatan akuntansi yang tidak wajar untuk menutupi kerugian serta mempercantik kinerja perusahaan. Modus yang dilakukan antara lain adalah membesar-besarkan nilai aset serta menyembunyikan utang perusahaan melalui rekayasa pencatatan transaksi dengan kontraktor (Whitehead & Belghitar, 2022).

Kemudian muncul skandal besar di Jepang dan China. Di Jepang, Toshiba, yang pernah merajai pasar elektronik global, resmi dihapus dari Bursa Efek Tokyo pada 20 Desember 2023 setelah 74 tahun tercatat sebagai perusahaan terbuka. Kejatuhan Toshiba bermula pada 2015 ketika terungkap praktik manipulasi akuntansi selama tujuh tahun yang melibatkan manajemen puncak. Toshiba melebih-lebihkan laba sebesar 1,59 miliar dolar AS (sekitar Rp24,79 triliun), merusak reputasinya secara signifikan (Kompas.com, 2024). Sementara itu, di China, Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) menjatuhkan denda 4,175 miliar yuan (sekitar Rp9,1 triliun) kepada Evergrande Group akibat manipulasi laporan keuangan. Perusahaan ini diketahui menggelembungkan pendapatan hingga 78 miliar dolar AS (sekitar Rp1.227 triliun) selama dua tahun. CSRC menyebut kasus ini sebagai skandal penipuan keuangan paling berdampak dalam sejarah China (CNN Indonesia, 2024)

Seringnya tindakan curang yang muncul dalam aktivitas bisnis di Indonesia mencerminkan keberadaan praktik yang belum sepenuhnya terkendali, bahkan pada entitas milik negara yang telah terdaftar di pasar modal. Peristiwa yang terungkap pada PT Garuda Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya, serta PT Asabri memperlihatkan bahwa risiko rekayasa laporan keuangan tetap melekat, sekalipun pada korporasi dengan skala besar dan struktur yang memadai. Kasus PT Garuda Indonesia menjadi salah satu contoh yang menonjol, di mana perusahaan melaporkan kinerja keuangan yang berbalik dari kerugian pada tahun sebelumnya menjadi laba pada tahun 2018. Namun, perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris independen mengindikasikan adanya permasalahan dalam penyajian laporan tersebut. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan sebelum realisasi, sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal itulah yang membuat PT Garuda Indonesia, Tbk. sebelumnya merugi dapat kembali memperoleh laba (Khumairoh et al., 2022).

Kerugian ekonomi tidak menjadi satu-satunya implikasi yang ditimbulkan, melainkan turut muncul pertentangan terhadap arah pembangunan global yang telah dirumuskan oleh PBB melalui SDGs, sebagai akibat dari praktik kecurangan laporan keuangan tersebut. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Manipulasi laporan keuangan secara langsung melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut. Selain itu, Tujuan ke-8

mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuntut terciptanya sistem pasar yang sehat dan efisien, yang hanya dapat terwujud apabila informasi keuangan disajikan secara andal.

Pada konteks sektor energi sebagai objek penelitian ini, relevansi tersebut semakin kuat karena Tujuan ke-7 mengenai energi bersih dan terjangkau menempatkan sektor energi sebagai sektor strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Transparansi laporan keuangan perusahaan energi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor, memastikan keberlanjutan pembiayaan proyek energi, serta mendukung stabilitas sektor yang berperan besar terhadap perekonomian nasional.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan individu manajemen, melainkan juga karena adanya celah pada sistem pengawasan perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa masalah ini muncul akibat asimetri informasi antara manajemen (*agent*) yang menguasai data internal perusahaan dengan pemegang saham maupun investor (*principal*) yang hanya dapat mengandalkan laporan keuangan. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi manajemen untuk bertindak di luar batas wajar demi memenuhi target atau kepentingan tertentu.

Kualitas audit memegang peran yang cukup dominan dalam menekan celah tersebut. Kualitas audit pada dasarnya merujuk pada probabilitas seorang auditor untuk menangani salah saji material baik disengaja ataupun tidak dalam laporan keuangan.

Auditor yang independen, kompeten, dan berintegritas tinggi akan lebih mampu memberikan penilaian objektif, sehingga audit yang berkualitas dapat meminimalisir kesenjangan informasi antara manajemen dan *stakeholder* lainnya. Dengan audit berstandar profesional, transparan dan akuntabilitas perusahaan akan meningkat, sementara ruang gerak manajemen untuk melakukan penyimpangan semakin terbatas.

Pengukuran mutu audit umumnya direpresentasikan melalui sejumlah indikator, salah satunya berupa reputasi KAP. Pengakuan terhadap kapasitas audit yang lebih unggul kerap dilekatkan pada KAP yang berafiliasi dengan kelompok Big Four, yakni PwC, Deloitte, KPMG, dan EY. Keunggulan tersebut ditopang oleh ketersediaan sumber daya yang lebih ekstensif, penerapan prosedur yang lebih rigor, serta tuntutan menjaga reputasi berskala global yang melekat pada entitas tersebut (Pham et al., 2025).

Upaya pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak dapat hanya bertumpu pada audit eksternal, tetapi juga membutuhkan penguatan mekanisme pengendalian dari dalam organisasi. Dijadikan sebagai landasan utama bagi operasional perusahaan yang tertata dan bertanggung jawab, prinsip pengelolaan korporasi yang baik atau GCG menuntun jalannya aktivitas organisasi agar berlangsung secara akuntabel, terbuka, serta berpijak pada asas keadilan dan kemandirian. Melalui sistem ini, ruang gerak manajemen dalam mengambil keputusan tidak lagi bersifat absolut, melainkan berada dalam kerangka pengawasan yang

sistematis dan berlapis. Dengan demikian, GCG berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus menekan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan.

Efektivitas GCG menjadi krusial karena praktik manipulasi laporan keuangan sering kali terjadi ketika mekanisme pengawasan internal lemah atau hanya dijalankan secara formalitas. Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG secara konsisten akan lebih mampu menjaga integritas laporan keuangannya, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan publik. Terbukanya peluang bagi pihak manajemen untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan dengan mengesampingkan hak pemegang saham serta pemangku kepentingan lain merupakan konsekuensi dari lemahnya implementasi GCG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian terhadap praktik kecurangan pelaporan keuangan oleh GCG ditentukan oleh tingkat penyerapan prinsip-prinsip tata kelola ke dalam aktivitas operasional harian perusahaan. Kepatuhan yang hanya bersifat administratif terhadap regulasi tidak cukup memberikan dampak signifikan apabila tidak disertai penghayatan nilai-nilai tata kelola secara menyeluruh dalam praktik bisnis. GCG dapat diproksikan menjadi tiga komponen utama yaitu, Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional.

Ketiadaan keterikatan kepentingan dengan pihak manajemen maupun pemegang saham pengendali menjadi ciri utama dari anggota dewan komisaris yang dikenal sebagai komisaris independen, yang posisinya ditempatkan sebagai bagian

krusial dalam struktur GCG. Peran yang melekat pada posisi ini mengarah pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang bersifat imparial, sehingga arah kebijakan perusahaan tetap selaras dengan kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk kelompok minoritas. Keberadaan fungsi pengawasan yang netral tersebut selanjutnya dipandang, menurut *agency theory*, sebagai suatu mekanisme pengendalian yang mampu menekan potensi konflik antara pihak manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal, khususnya melalui aktivitas monitoring yang terbebas dari keberpihakan.

Temuan empiris terkait efektivitas komisar independen dalam menekan kecurangan laporan keuangan masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian, seperti Fitriani (2024) dan Mousavi et al (2022), mengindikasikan bahwa keberadaan komisar independen berkorelasi negatif dengan praktik kecurangan, yang menunjukkan peran pengawasan berjalan secara efektif. Ketidaksignifikanan hubungan tersebut justru diindikasikan oleh temuan penelitian, sebagaimana dinyatakan oleh Alice & Christian (2022) serta Nindito et al (2024), Suatu kecenderungan kemudian teridentifikasi, yakni keberadaan komisar independen pada sejumlah entitas usaha lebih merefleksikan pemenuhan persyaratan *box-ticking*, alih-alih menghadirkan peran pengawasan yang dijalankan secara substantif dan efektif..

Suatu perangkat pengawasan yang berfungsi menunjang kualitas tata kelola perusahaan direpresentasikan oleh *Audit Committee*, yang pembentukannya dilakukan oleh dewan komisar guna memperkuat pelaksanaan fungsi kontrol. Penjagaan

terhadap keandalan laporan keuangan, penilaian atas efektivitas sistem pengendalian internal, serta peran sebagai penghubung dengan auditor eksternal dijalankan oleh organ ini secara terstruktur. Dalam kerangka *agency theory*, kapasitas komite audit diposisikan sebagai instrumen yang mampu mereduksi asimetri informasi antara pihak manajemen selaku agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Melalui keberadaan mekanisme tersebut, peluang terjadinya deviasi penggunaan wewenang dapat diminimalkan secara signifikan.

Berbagai temuan empiris mengindikasikan bahwa komite audit yang berfungsi secara optimal dan didukung kompetensi yang memadai cenderung menurunkan risiko terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan (Shanikat & Aldabbas, 2025). Dengan kata lain, semakin kuat kualitas pengawasan yang dijalankan, semakin terbatas ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, karena adanya pengawasan ketat. Akan tetapi, ada pula penelitian yang menemukan hasil tidak berpengaruh signifikan yang diteliti oleh Luthfiyyah et al (2024) dan Arum et al (2023). Hal ini sering dikaitkan dengan fakta bahwa banyak perusahaan hanya membentuk komite audit sebagai pemenuhan regulasi, tanpa memastikan kinerjanya berjalan optimal. Menariknya, beberapa studi lain menemukan pengaruh positif yakni semakin besar komite audit, justru semakin tinggi potensi terjadinya fraud karena koordinasi menjadi sulit, agenda rapat jarang efektif, atau bahkan adanya “free rider” yang hanya pasif mengikuti keputusan mayoritas (Nyamumbo, 2024).

Persentase saham yang dikuasai oleh entitas kelembagaan, seperti perusahaan asuransi, sektor perbankan, dana pensiun, serta institusi finansial lainnya, didefinisikan sebagai *Institutional Ownership* atau kepemilikan institusional. Berdasarkan *agency theory*, kemampuan pengawasan yang lebih superior cenderung dimiliki oleh investor institusional karena ditopang oleh kelengkapan sumber daya serta dorongan kepentingan ekonomi yang lebih kuat, sehingga kecenderungan tindakan oportunistik oleh pihak manajerial dapat ditekan secara lebih efektif dibandingkan dengan investor individu. Oleh sebab itu, peningkatan proporsi kepemilikan institusional diharapkan berkorelasi dengan penurunan probabilitas terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Adanya relasi yang berlawanan arah antara praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan dan kepemilikan institusional diperlihatkan oleh berbagai hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi kepemilikan oleh institusi cenderung diikuti oleh penurunan kecenderungan terjadinya manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Dukungan atas keterkaitan ini disajikan melalui beragam studi yang mengonfirmasi pola hubungan negatif tersebut secara konsisten (Nindito et al., 2024). Investor institusi memiliki keahlian analitis yang memadai, akses ke informasi yang lebih luas, serta kepentingan jangka panjang, sehingga cenderung mendorong perusahaan untuk menjaga kualitas pelaporan. Namun, hasil berbeda juga ditemukan dalam beberapa studi lain. Penelitian dari Fitriani (2024) yang menunjukkan pengaruh positif dengan argumen bahwa institusi tertentu bisa saja justru berkolusi dengan manajemen untuk

menjaga harga saham jangka pendek atau memperoleh keuntungan pribadi, sehingga perannya dalam monitoring melemah.

Ketidakkonsistenan pola keterkaitan telah teridentifikasi dari beragam hasil riset sebelumnya, khususnya pada relasi yang melibatkan kualitas audit serta efektivitas tata kelola perusahaan terhadap praktik kecurangan laporan keuangan. Variasi temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterhubungan antar variabel belum memperlihatkan kecenderungan yang seragam, sehingga indikasi pengaruh yang muncul cenderung fluktuatif dan tidak serentak pada setiap kajian yang dilakukan. Sejumlah penelitian melaporkan adanya pengaruh yang signifikan, sedangkan studi lainnya justru mengindikasikan hubungan yang lemah bahkan tidak berpengaruh. Adanya ketidakteraturan hasil temuan tersebut memperlihatkan keberadaan ruang kajian yang belum tergarap secara optimal, sehingga penelaahan lanjutan menjadi diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai determinan yang memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut dimungkinkan dipengaruhi oleh variasi karakteristik sektor dan periode pengamatan yang digunakan. Mayoritas penelitian terdahulu masih terkonsentrasi pada sektor manufaktur dan keuangan, yang memiliki struktur operasional serta pola pelaporan yang relatif berbeda dengan sektor energi. Sektor energi ditandai oleh pengelolaan aset tetap bernilai besar, penggunaan estimasi cadangan sumber daya, kontrak jangka panjang, serta ketergantungan terhadap

fluktuasi harga komoditas global. Karakteristik tersebut menuntut penggunaan pertimbangan profesional (judgment) yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan dan berpotensi memperluas ruang diskresi manajerial.

Ketimpangan informasi antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal cenderung melebar akibat bertambahnya ruang diskresi manajemen, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi. Peningkatan keleluasaan tersebut mendorong kemungkinan tersajinya laporan yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi perusahaan, terutama saat terdapat dorongan untuk menjaga performa maupun persepsi investor terhadap citra perusahaan. Di sisi lain, tekanan ekonomi yang muncul setelah pandemi serta fluktuasi harga energi global sepanjang periode 2020–2024 turut memperbesar potensi benturan kepentingan yang berkaitan dengan upaya pencapaian target kinerja. Dalam konteks dengan tingkat diskresi dan tekanan kinerja yang tinggi, efektivitas mekanisme monitoring seperti kualitas audit dan tata kelola perusahaan menjadi semakin relevan untuk diuji.

Sebuah ruang pengujian yang relevan bagi penilaian ulang atas kapasitas kualitas audit serta efektivitas tata kelola perusahaan sebagai perangkat pengendalian dalam menekan kemungkinan manipulasi laporan keuangan ditunjukkan oleh sektor energi. Peran kedua variabel tersebut dipandang mampu bertindak sebagai instrumen pengawasan yang berfungsi membatasi kecenderungan terjadinya penyimpangan pelaporan finansial. Kontribusi berbasis temuan diharapkan muncul dari penelitian ini

guna menguraikan ketidakselarasan hasil studi terdahulu sekaligus memperluas khazanah keilmuan terkait upaya preventif terhadap praktik kecurangan pelaporan keuangan, khususnya pada sektor dengan karakteristik kompleks dan posisi vital bagi perekonomian nasional. Berlandaskan pemaparan tersebut, judul penelitian yang diangkat oleh penulis adalah: **“Pengaruh Kualitas Audit dan Efektivitas Tata Kelola Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berpijak pada uraian awal yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan secara lebih terstruktur sebagai berikut:

1. Kecurangan laporan keuangan masih menjadi bentuk fraud dengan dampak kerugian terbesar dibandingkan jenis kecurangan lainnya. Berdasarkan laporan (ACFE, 2024), median kerugian akibat kecurangan laporan keuangan mencapai USD 766.000, lebih tinggi dibandingkan penyalahgunaan aset sebesar USD 120.000 dan korupsi sebesar USD 200.000. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan permasalahan serius yang membutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan.
2. Sektor energi, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan, memiliki tingkat kerugian fraud yang tinggi. Data ACFE (2024) menunjukkan bahwa

sektor pertambangan mencatat median kerugian sebesar USD 550.000, tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor energi menjadi konteks yang relevan untuk menguji efektivitas mekanisme pengawasan laporan keuangan.

3. Masih banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan bahwa kecurangan tetap terjadi meskipun telah terdapat mekanisme pengawasan. Kasus seperti Petrobras (Brasil), Toshiba (Jepang) dengan manipulasi laba sebesar USD 1,59 miliar, Evergrande (China) dengan penggelembungan pendapatan hingga USD 78 miliar, serta PT Garuda Indonesia yang mengakui pendapatan sebesar USD 239,94 juta secara tidak tepat, menunjukkan bahwa praktik kecurangan laporan keuangan masih menjadi fenomena nyata.
4. Kualitas audit menjadi mekanisme pengawasan dengan tata kelola perusahaan diharapkan mampu menekan kecurangan laporan keuangan. Namun dalam praktiknya, efektivitasnya masih dipertanyakan, mengingat masih ditemukannya kasus kecurangan pada perusahaan yang telah diaudit dan memiliki struktur tata kelola. Hal ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara fungsi pengawasan secara konseptual dengan implementasinya di lapangan.
5. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak konsisten terkait pengaruh kualitas audit dan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan adanya *research gap* yang

perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada sektor energi yang memiliki karakteristik kompleks, seperti penggunaan estimasi akuntansi yang tinggi, proyek jangka panjang, serta tekanan kinerja akibat fluktuasi harga energi.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari penjabaran pada bagian latar belakang, rumusan persoalan penelitian ini kemudian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Audit, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024?
2. Seberapa besar pengaruh Kualitas Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024?
3. Seberapa besar pengaruh Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024?
4. Seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024?

5. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024?
6. Seberapa besar pengaruh Kualitas Audit dan Efektivitas Tata Kelola Perusahaan secara simultan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan persoalan yang telah ditetapkan, arah yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kualitas Audit, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualitas Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualitas Audit dan Efektivitas Tata Kelola Perusahaan secara simultan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Suatu sumbangan terhadap pengayaan khazanah pustaka yang berkaitan dengan teori agensi, khususnya yang menelaah kecurangan laporan keuangan, diharapkan dapat dihasilkan melalui penelitian ini. Penambahan cakrawala pemahaman mengenai sejauh mana kualitas audit serta efektivitas tata kelola perusahaan berperan dalam mereduksi praktik manipulasi laporan keuangan turut diupayakan. Selanjutnya, hasil yang diperoleh diharapkan dapat difungsikan sebagai pijakan referensial bagi kajian lanjutan, terutama penelitian yang mengangkat persoalan kecurangan laporan keuangan pada entitas sektor energi yang tercatat di BEI.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan energi, Informasi mengenai determinan pengendalian, baik yang bersumber dari mutu audit maupun praktik tata kelola korporasi, diharapkan dapat diperoleh dari temuan penelitian ini sehingga potensi kecurangan pada laporan keuangan dapat ditekan secara optimal. Terutama dalam mendukung manajemen untuk mengantisipasi serta mereduksi risiko penyimpangan pelaporan keuangan melalui penguatan mekanisme pengawasan yang relevan.
- b. Bagi investor dan pemegang saham, Penilaian terhadap tingkat keandalan laporan keuangan pada perusahaan sektor energi diharapkan memperoleh perluasan wawasan melalui penelitian ini, sekaligus menjadi landasan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Bagi profesi akuntan dan auditor, diharapkan sebagai bahan pertimbangan yang mampu mengoptimalkan efektivitas praktik audit, penelitian ini diarahkan pada penilaian risiko kecurangan laporan keuangan, khususnya pada sektor energi yang ditandai oleh tingginya kerumitan transaksi serta ketatnya regulasi yang mengaturnya.